



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
UPT. BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA



MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
SEMESTER I 2022

A. PENDAHULUAN

UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Wilayah Kabupaten Bangka. UPT Badan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis penunjang Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang pendapatan diantaranya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat wilayah Kabupaten Bangka dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pajak air permukaan guna meningkatkan pendapatan pajak daerah bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Dalam mencapai tujuan tersebut, UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pelayanan pajak melalui berbagai mekanisme. Termasuk dalam hal ini, melalui pencegahan atau pengendalian adanya praktik gratifikasi yang terjadi di UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka untuk mencapai peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan perpajakan kendaraan.

Pencegahan atau sistem pengendalian praktik gratifikasi telah diwujudkan dengan adanya pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu melalui surat keputusan Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor 188.4/ /UPTB.BANGKA/2018 tanggal 2 Oktober 2018. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu ini juga sebagai wujud konkrit pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi.

Untuk menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada, diperlukan kegiatan monitor dan evaluasi secara berkala atas penerapan sistem tersebut. Oleh karena itu, UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka merasa perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian yang ada di lingkungan UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, khususnya yang terkait dengan pemberian upah pengurusan pajak bagi pegawai UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka yang dilakukan dalam kurun waktu Januari sampai Juni 2022.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi secara berkala diharapkan dapat mencegah dan menghindarkan adanya praktik pemberian gratifikasi di UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka atas pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka pada periode Semester I 2022.

C. RUANG LINGKUP

Pengendalian Gratifikasi mencakup seluruh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang menerima pelayanan dari UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, baik mencakup pelayanan di dalam pengurusan administratif terkait pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Air Permukaan serta layanan administrasi lainnya terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi pembantu pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbatas pada terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan oleh penerima gratifikasi

D. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi ini dilakukan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi sampai dengan kurun waktu Januari sampai Juni 2022 di UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dengan melibatkan Tim Pengendalian Gratifikasi Pembantu.

E. HASIL EVALUASI

Adapun hasil monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka selama kurun waktu Juli s.d Desember 2022, dari laporan Penolakan atas Penerimaan Pemberian Hadiah yang menjadi bagian dalam Gratifikasi ASN yang diterima sebanyak 35 (tiga puluh lima berkas) tidak dijumpai adanya gratifikasi dalam bentuk apapun terhadap jajaran struktural dan pegawai staf di UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

Data laporan dari masing –masing pegawai dalam tabel berikut :

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	GRATIFIKASI	KET
1.	Yeri, S.Sos NIP. 19641213 198603 1 011	Kepala UPT	NIHIL	
2.	Meri Eriyana, S.E. NIP. 19770718 200604 2 010	Kasubbag Tata Usaha	NIHIL	
3.	Yuli Mahyudi, SH, M.M. NIP. 19830724 200701 1 001	Kasi Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan	NIHIL	
4.	Ahmad Taufik, SE NIP. 19800705 200701 1 023	Kasi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan	NIHIL	
5.	Iman Hidayat, SH NIP. 19690813 200212 1 012	Analisis Pemeriksa Pajak	NIHIL	
6.	Ellis Susanti, S.IP NIP. 19671018 199903 2 005	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	NIHIL	
7.	Syaiful Bachri, S.E NIP. 19810608 201101 1 002	Analisis Pemeriksa Pajak	NIHIL	
8.	Rika Riza Wianty, S.Kom NIP. 19770109 201001 2 009	JFT Pranata Komputer Muda	NIHIL	
9.	Nanin Nadiarti, A.Md NIP.19770409 200212 2 003	Pemeriksa Teknologi Informasi	NIHIL	
10.	Ade Wira Saputra, SH NIP. 19851102 201101 1 002	Analisis Pajak Daerah	NIHIL	
11.	Dheny Saputra, A.Md NIP. 19750912 200212 1 009	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	NIHIL	
12.	Ella Valindri, A,Md NIP. 19751119 200212 2 003	Pengelola Keuangan	NIHIL	
13.	Marlina Indah Palupi, A.Md NIP. 19770317 200212 2 006	Verifikator Pajak	NIHIL	
14.	Pitriyanti, A.Md NIP.19770915 200212 2 004	Bendahara Pembantu	NIHIL	
15.	Shella Novita, A.Md NIP. 19781123 200212 2 010	Pengelola Keuangan	NIHIL	
16.	Agusri, S.I.P NIP. 19760830 200604 1 010	Analisis Pajak Daerah	NIHIL	
17.	Heni Aryani, S.E. NIP. 19880107 200903 2 001	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	NIHIL	
18.	Aprianti, S.AP NIP. 19820410 200212 2 002	Analisis Pemeriksa Pajak	NIHIL	
19.	Sugiarti NIP. 196711 24 199102 2 002	Pengadministrasi Pajak	NIHIL	
20.	Hasanuddin, S.I.Kom NIP. 19750817 200801 1 004	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	NIHIL	
21.	Alpata Zulkamain, S.I.Kom NIP. 19750217 200212 1 004	Pemeriksa Teknologi Informasi	NIHIL	

22.	Tauvikarya, S.I.Kom NIP. 19671117 200604 1 003	Analisis Pajak Daerah	NIHIL	
23.	Tamawiji, S.IP. NIP. 19720616 200212 1 005	Analisis Pemeriksa Pajak	NIHIL	
24.	Malik NIP. 19670313 200701 1 007	Analisis Penagihan Pajak	NIHIL	
25.	Ody Kurnia, S.E. NIP. 19720212 201101 1 001	Pemeriksa Teknologi Informasi	NIHIL	
26.	Imelda Dewi Guna NIP. 19790515 201001 2 005	Pengelola Data Penagihan Pajak	NIHIL	
27.	Robby Afryanto NIP. 19750416 200212 1 004	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi	NIHIL	
28.	Abdullah Syukur NIP. 19700414 200604 1 005	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	NIHIL	
29.	Suparman NIP. 19670904 200604 1 006	Pengadministrasi Pajak	NIHIL	
30.	Rahmawati NIP. 19761201 200701 2 005	Pengadministrasi Umum	NIHIL	
31.	Rona Feramasari NIP. 19811029 200701 2 001	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi	NIHIL	
32.	Juli Erfiansyah NIP. 19730703 200801 1 003	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi	NIHIL	
33..	Imam Rudi Hartono NIP. 197007 200902 1 001	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi	NIHIL	
34.	Deddy Kurniawan NIP. 19831015 201001 1 004	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi	NIHIL	

F. REKOMENDASI

Hasil dari monitoring dan evaluasi di UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :


1. Terus meningkatkan pemahaman seluruh pegawai pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tidak menerima gratifikasi terkait jabatan, tugas, atau kewenangannya.
2. Terus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
3. Telah dilakukannya sosialisasi gratifikasi melalui media Stiker Penolakan Gratifikasi, pesan layanan gratifikasi melalui Banner dan Spanduk serta penggunaan Pin "Stop Gratifikasi" kepada masing-masing Pegawai UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka (Foto terlampir).
4. Adanya penambahan sarana kantor berupa camera CCTV sebanyak 32 titik pasang guna pengawasan pegawai secara optimal (foto terlampir).

G. LAMPIRAN

Berikut ini berisikan lampiran yang mendukung adanya sistem pengendalian di UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

Sungailiat, Juni 2022

**KETUA TIM MONEV
PENGUATAN PENGAWASAN
UPT BAKUDA PROV. KEP. BABEL
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,**


**YULI MAHYUDI, SH, MM
NIP. 19830724 200701 1 001**